

MODEL LOGIKA-CETAK BIRU KINERJA: IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PADA BPBD KOTA TARAKAN

FERICA CHRISTINAWATI PUTRI

Universitas Borneo Tarakan
E-mail: fericacutri@borneo.ac.id

Abstract

The aim of this research is to evaluate the accountability implementation and performance measurement system of the Regional Disaster Management Agency in Tarakan City using the Logic Model - Performance Blueprint developed by Paul J Longo (2004). The Logic Model-Performance Blueprint is used for performance measurement regarding the achievement of service orientation to the community based on the benefit of the community. The Performance Blueprint will provide an evaluation of the implementation of the performance measurement system by evaluating the appropriateness of the information consisting of the main performance indicators from the SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) document, which consists of strategic planning documents to reporting. This study uses a qualitative case study approach. The results of this study indicate that the Tarakan City Regional Disaster Management Agency has not fully demonstrated the suitability of information from planning documents to reporting 33% of performance indicators are outcome-oriented.

Keywords: Performance blueprints, logic model, accountability, SAKIP, performance measurement system

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi akuntabilitas dan sistem pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan dengan menggunakan Logic Model - Performance Blueprint yang dikembangkan oleh Paul J Longo (2004). The Logic Model-Performance Blueprint digunakan untuk pengukuran kinerja terkait pencapaian orientasi pelayanan kepada masyarakat berdasarkan kemaslahatan masyarakat. Cetak Biru Kinerja akan memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pengukuran kinerja dengan menilai kesesuaian informasi yang terdiri dari indikator kinerja utama dari dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) yang terdiri dari dokumen perencanaan strategis hingga pelaporan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan belum sepenuhnya menunjukkan kesesuaian informasi dari dokumen perencanaan hingga pelaporan 33% indikator kinerja berorientasi pada hasil.

Kata kunci: Cetak biru kinerja, model logika, akuntabilitas, SAKIP, sistem pengukuran kinerja

PENDAHULUAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk reformasi birokrasi untuk mencapai akuntabilitas yang terus dilaksanakan dan ditingkatkan oleh berbagai Organisasi Pemerintah Daerah (R, Radinda; S, Suji, 2021). SAKIP memiliki tujuan sistematis untuk penetapan tujuan, pengumpulan data, pengklasifikasian pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada setiap instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29

Tahun 2014, SAKIP memiliki beberapa komponen diantaranya perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, implementasi kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Sehingga SAKIP membutuhkan dokumentasi yang sistematis memiliki keselarasan, kesesuaian dan konsistensi informasi.

Akuntabilitas memiliki makna sebagai hubungan antar pihak yang memegang kendali dan pengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Secara perspektif dari sistem akuntabilitas, terdapat beberapa karakteristik pokok sistem akuntabilitas diantaranya, yaitu berfokus pada hasil, menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk mengukur kinerja, menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atas suatu program atau kebijakan, menghasilkan data secara konsisten secara sistematis, dan melaporkan hasil (*outcomes*) dan mempublikasi secara teratur (Sadjiarto, 2000).

Permasalahan atas pelaksanaan akuntabilitas pada organisasi pemerintahan saat ini yaitu indikator dari ketercapaian keberhasilan maupun kegagalan pada setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi hanya berfokus pada kemampuan penyerapan anggaran (Rahmadoni, 2018). Selain itu, keberhasilan instansi ditekankan hanya pada komponen input dari aktivitas tanpa terget pada output maupun dampaknya kepada masyarakat atas aktivitas yang diberikan melalui program dan kegiatan instansi masih jauh dari standar (Bastian, 2006). Pelaksanaan SAKIP berkaitan dengan akuntabilitas kinerja pemerintahan di Indonesia, hasil analisis atas SAKIP di kota Pangkalpinang belum menunjukkan keselarasan dan kesesuaian informasi dari dokumen perencanaan hingga pelaporan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Rahmadoni, 2018). Hasil evaluasi terhadap implementasi sistem akuntabilitas kinerja dengan menggunakan Model Logika-Cetak Biru Kinerja yang dikembangkan oleh (Longo, 2002) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kudus juga menemukan adanya ketidakselarasan komponen SAKIP yang terdiri dari dokumen perencanaan strategis, perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja (Wijayanto, 2016). Sebagian besar indikator kinerja yang menjadi komponen SAKIP pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kudus berorientasi pada penyediaan layanan dan belum berorientasi pada masyarakat (Wijayanto, 2016). Menurut (Akbar, 2011) terdapat kesulitan yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam praktik akuntabilitas yang disebabkan oleh kesulitan pengukuran, keterbatasan pengetahuan secara teknis, komitmen manajemen, persyaratan legislatif dan kemampuan organisasi berpengaruh

terhadap proses pengembangan dan penetapan indikator kinerja sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja pemerintah di Indonesia.

Model Logika-Cetak Biru Kinerja yang dikembangkan oleh (Longo, 2002) menyajikan metode visual untuk menggambarkan hubungan antara komponen yang diperlukan untuk mengoperasikan aktivitas, strategi, dan layanan yang komponen keluarannya akan dipetakan pada Empat Kuadran-Friedman. Model Logika-Cetak Biru Kinerja menampilkan bahwa perencanaan dan hasil yang diharapkan dari perencanaan tersebut (Knowlton & Philips), sehingga Model Logika-Cetak Biru Kinerja dapat digunakan untuk mengevaluasi implementasi SAKIP yang memerlukan keselarasan, kesesuaian informasi, dan konsistensi.

Oleh karena itu, pada penelitian ini Model Logika-Cetak Biru Kinerja digunakan untuk mengevaluasi keselarasan komponen dalam dokumen SAKIP serta menentukan posisi indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan pada Empat Kuadran-Friedman.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 menyebutkan SAKIP yaitu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

1. Rencana strategis. Kementrian Negara/Lembaga menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode lima tahunan. SKPD menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahunan.
2. Perjanjian kinerja. Setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun Rencana Kinerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Perjanjian kerja disusun dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kerja. Indikator kinerja sebagaimana dimaksud harus memenuhi kriteria yaitu spesifik, dapat terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu, serta dapat dipantau dan dikumpulkan. Perjanjian kinerja merupakan salah satu dokumen perencanaan strategis untuk periode satu tahun.

3. Pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran dilakukan dengan cara: membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran kinerja yang dicantumkan dalam lembar atau dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan, membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran kinerja lima tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis.
4. Pengelolaan data kinerja. Pengelolaan data kinerja dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja.
5. Pelaporan Kinerja. Laporan kinerja terdiri dari laporan kinerja interim dan laporan kinerja tahunan. Ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana dimaksud paling sedikit menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi pencapaian target kinerja, penjelasan yang memadai atau pencapaian kinerja, pembandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis.
6. Reviu dan evaluasi kinerja. Aparat pengawas intern pemerintah melakukan reviu atas laporan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi.

SAKIP sangat penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya dalam menyediakan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, SAKIP juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mengurangi korupsi di dalam pemerintah. Berikut pentingnya SAKIP, karena:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah: SAKIP memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya publik dan kinerja pelayanan publik. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap publik.
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik: Dengan melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja pemerintah, SAKIP dapat mengidentifikasi masalah dan kesalahan dalam pelaksanaan program pemerintah. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dan memperbaiki kebijakan yang tidak berfungsi.

3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah: Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, SAKIP dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
4. Mendorong partisipasi publik: SAKIP mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa kepentingan publik diakomodasi dalam program dan kebijakan pemerintah.
5. Meningkatkan pengelolaan keuangan publik: SAKIP membantu pemerintah dalam mengelola anggaran dan sumber daya publik dengan lebih baik, sehingga penggunaan anggaran dan sumber daya publik dapat lebih efisien dan efektif.

Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui SAKIP yang disebut LAKIP.

Model Logika-Cetak Biru Kinerja

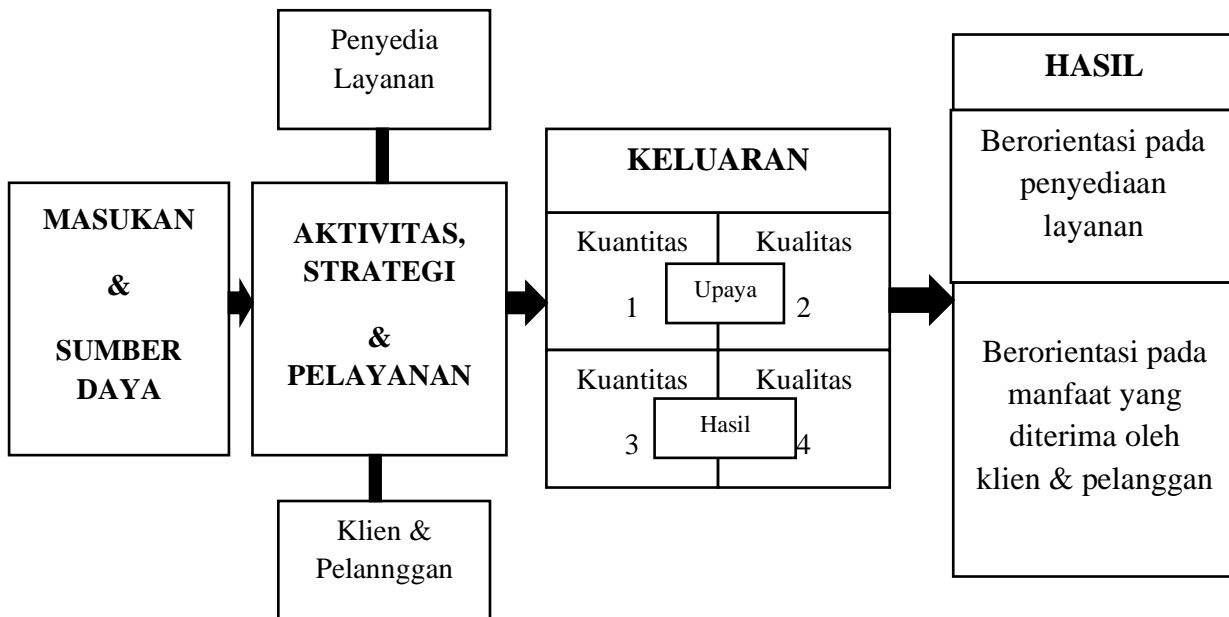
Kinerja adalah hasil kerja atau prestasi yang telah dicapai oleh seseorang atau sebuah organisasi dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan, kinerja pemerintah dapat diukur berdasarkan efektivitas dan efisiensi dalam menyediakan pelayanan publik, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Kinerja sangat penting karena merupakan indikator pencapaian tujuan atau target yang telah ditetapkan. Dalam konteks organisasi atau perusahaan, kinerja yang baik dapat memastikan kelangsungan bisnis dan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Sedangkan dalam konteks pemerintahan, kinerja yang baik dapat memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan. Pentingnya kinerja terletak pada memastikan pencapaian tujuan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, meningkatkan kepuasan pelanggan atau masyarakat, meningkatkan motivasi karyawan, dan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan demikian, pengukuran dan evaluasi kinerja yang baik harus dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa

organisasi atau pemerintah dapat memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Model logika cetak biru (PLM) adalah suatu pendekatan perencanaan program yang digunakan untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi program atau kegiatan. Model logika ini menggambarkan hubungan sebab-akibat antara aktivitas, hasil, dan tujuan akhir program. Model logika cetak biru digunakan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan program terkait langsung dengan tujuan akhir, dan bahwa semua sumber daya digunakan secara efektif. PLM merupakan bentuk model logika yang terdiri atas tujuh elemen standar yaitu sumber daya, aktivitas, keluaran, hasil jangka pendek, menengah dan panjang, serta dampak atau perubahan dari terjalannya suatu program. Model logika yang terdiri atas TOC dan PLM ini dapat digunakan untuk mengembangkan strategi, meningkatkan kemampuan untuk menjelaskan konsep, serta mengevaluasi program yang telah dilakukan dengan melihat alur logika pada tahap perencanaan strategi hingga hasil (Knowlton & Philips). Dengan demikian, model logika dapat digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian informasi sistem pengukuran kinerja dari perencanaan strategi hingga pada pelaporan kinerja. Performance blueprint merupakan model logika inovatif yang merupakan konstruksi model logika digabungkan dengan pendekatan empat kuadran Friedman (Longo, 2002). Penggunaan pendekatan empat kuadran Friedman merupakan cara untuk mengidentifikasi dan mengkategorisasikan indikator kinerja kedalam empat kuadran terkait dengan mengukur keluaran-usaha dan keluaran-hasil.

Model logika cetak biru memungkinkan pemangku kepentingan program untuk mengidentifikasi apa yang perlu dilakukan, bagaimana melakukannya, dan hasil yang diharapkan. Hal ini membantu mereka memahami bagaimana program akan mencapai tujuannya dan bagaimana setiap elemen program saling terkait. Model logika cetak biru juga digunakan untuk menentukan indikator keberhasilan dan evaluasi program. Model logika cetak biru dapat digunakan dalam berbagai jenis program, termasuk program sosial, program kesehatan, dan program lingkungan. Model ini juga dapat digunakan oleh organisasi nirlaba, pemerintah, atau bisnis. Model logika cetak biru membantu memastikan bahwa program mencapai tujuan akhir dan memberikan manfaat yang diinginkan untuk pemangku kepentingan program. Model logika cetak biru terdiri dari empat elemen utama: input, aktivitas, hasil, dan dampak. Input adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan

program, seperti tenaga kerja, waktu, anggaran, dan fasilitas. Aktivitas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hasil adalah produk yang dihasilkan dari kegiatan program, seperti pelatihan, peningkatan kapasitas, atau produk fisik. Dampak adalah perubahan yang terjadi di masyarakat atau lingkungan sebagai akibat dari hasil program, seperti perubahan perilaku, perubahan kebijakan, atau perubahan sosial.



Gambar 1. Model Logika-Cetak Biru Kinerja

Komponen hasil merupakan bagian terakhir dari proses input, aktivitas, dan output. Pada performance blueprint akan menggunakan empat pertanyaan Friedman untuk mengukur keluaran ke dalam kuadran. Pada halaman selanjutnya akan memperlihatkan tabel terdiri dari empat kuadran Friedman.

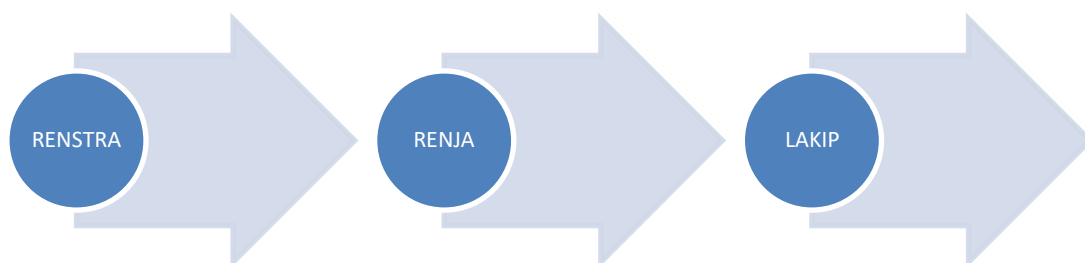
Tabel 1. Pendekatan 4 Kuadran

| PENGUKURAN UPAYA | | | |
|--|--------|---|------------------------------------|
| Kuantitas (#) | | Kualitas (%) | |
| <u>Prioritas 4</u> | | <u>Prioritas 2</u> | |
| Seberapa | banyak | pelayanan | Seberapa baik pelayanan dilakukan? |
| diberikan? | | | |
| PENGUKURAN HASIL | | | |
| <u>Prioritas 3</u> | | <u>Prioritas 1</u> | |
| Seberapa banyak masyarakat menjadi lebih baik? | | Berapa persen masyarakat yang menjadi lebih baik dan bagaimana caranya mereka menjadi lebih baik? | |

Tabel 1 menunjukkan penggunaan empat kuadran Friedman akan memberikan perhatian secara langsung terhadap sumber daya, perencanaan strategis, dan pelayanan yang diberikan kepada klien yang menjadi target (Friedman, 2005). Penggunaan empat kuadran Friedman akan membantu mengidentifikasi keluaran yang akan menjadi komponen hasil berorientasi upaya atau hasil berorientasi dampak. Komponen keluaran akan teridentifikasi menjadi komponen yang berorientasi upaya ketika indikator kinerja yang digunakan pada dokumen perjanjian kinerja dan laporan kinerja berorientasi pada internal organisasi. Indikator pada pada komponen keluaran akan teridentifikasi menjadi komponen yang berorientasi hasil ketika indikator tersebut disusun berdasarkan target kebermanfaatan yang akan diterima oleh masyarakat sebagai pemberi amanah atas penyelenggaraan pemerintahan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penerapan teknik pengumpulan data ini dengan melakukan penelusuran yang sistematis terhadap dokumen yang relevan (Yin, 2013). Sumber data dalam teknik pengumpulan data ini merupakan data sekunder antara lain dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Prosedur dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui riset lapangan dengan cara mendatangi secara langsung unit kerja yang menjadi objek penelitian yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan cara dokumentasi data, yaitu mempelajari data dan informasi yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di BPBD Kota Tarakan.



Gambar 2. Alur Logika Pengujian Keselarasan Informasi Dokumen Perencanaan Hingga Pelaporan

Prosedur penelitian terdiri dari analisis alur logika atas sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan mengevaluasi hubungan yang logis dan sistematis pada setiap dokumen

perencanaan hingga pelaporan. Analisis Evaluasi terhadap setiap dokumen menggunakan instrumen Model Logika-Cetak Biru Kinerja yang dikembangkan oleh Paul J. Longo, 2002.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Alur Logika pada Komponen Strategi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan BPBD Kota Tarakan

Komponen strategi merupakan keseluruhan tindakan spesifik yang mendukung terlaksananya suatu program (Knowlton & Philips, 2013). Berdasarkan Permenpan dan RB No 29 Tahun 2014 sasaran strategis ditetapkan dengan mempertimbangkan perencanaan jangka menengah, tahunan dan anggaran. Pada akhir periode tahun anggaran, sasaran strategis pada perjanjian kinerja akan dievaluasi dan dilaporkan ke dalam bentuk LAKIP. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LAKIP adalah pengukuran kinerja dan evaluasi secara memadai hasil analisis terhadap suatu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penggunaan *Model Logika-Cetak Biru Kinerja* sebagai alat evaluasi implementasi sistem pengukuran kinerja pada komponen strategi akan membedakan sasaran strategi dan aktivitas yang telah dilakukan. Sasaran strategi dan aktivitas yang dilakukan akan teridentifikasi menjadi *internally-oriented activities* dan *externally-oriented activities* (Longo, 2002). Komponen strategis diidentifikasi menggunakan sasaran strategis yang berasal dari 2 (dua) dokumen perencanaan dan 1 (satu) dokumen laporan kinerja, terdiri dari RENSTRA, RENJA, dan LAKIP. Hasil penelitian terhadap keselarasan informasi pada komponen strategis pada dokumen perencanaan dan laporan kinerja BPBD Kota Tarakan tahun anggaran 2021 menunjukkan ketidaksesuaian dan *externally-oriented activities*. Ketidaksesuaian sasaran strategis yang ditetapkan menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntabilitas kinerja kurang baik. Hubungan yang tidak logis akan menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan dalam mencapai target akuntabilitas kinerja organisasi. Hubungan yang tidak logis menunjukkan alur logika dalam penyusunan sasaran strategis dari dokumen perencanaan hingga pelaporan berdampak pada kesulitan pemerintah dalam mengambil keputusan, pengalokasian sumber daya, efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat (Akbar, 2011).

Tabel 2. Alur Logika Pengujian Kesesuaian Informasi Komponen Strategis pada Dokumen Perencanaan Komponen Strategi Alur Logika-Cetak Biru Kinerja

| No. | Komponen Strategi | | | Keterangan |
|-----|---|--|--|--------------|
| | Sasaran Strategis Pada Renstra | Sasaran Strategis Pada Renja | Sasaran Strategis Pada Lakip | |
| 1. | Meningkatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana | Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Administrasi Perangkat Daerah | Menurunnya Kejadian Bencana | Tidak Sesuai |
| 2. | Meningkatkan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Tercapainya Program Penanggulangan Bencana Yang Optimal | Meningkatnya Jumlah Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan | Tidak sesuai |
| 3. | Meningkatkan Pelayanan Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana | | Meningkatnya Kemampuan Rehabilitas/Rekonstruksi Fasilitas Umum Dan Penanganan Korban Bencana | Tidak sesuai |
| 4. | Meningkatkan Penataan Sistem Dan Penanggulangan Bencana | | | Tidak sesuai |

Analisis Alur Logika pada Komponen Keluaran Di Dokumen RENJA dan LAKIP

Tahap selanjutnya adalah menguji kesesuaian informasi pada komponen keluaran dari dokumen perencanaan hingga dokumen pelaporan berdasarkan Indikator Kinerja Utama pada setiap dokumen RENJA dan LAKIP. Komponen keluaran ini terdiri dari indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja. Alur logika merupakan model logika yang menggabungkan model logika tradisional dengan pendekatan empat kuadran Friedman (Longo, 2002). Hasil analisis terhadap kesesuaian informasi pada dokumen RENJA dan LAKIP menunjukkan bahwa indikator kinerja pada masing-masing dokumen menunjukkan ketidaksesuaian informasi. Ketidaksesuaian pada masing-masing indikator kinerja ini mengidentifikasi bahwa implementasi sistem pengukuran kinerja kurang baik dan sulit untuk mencapai akuntabilitas kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan. Ketidaksesuaian informasi pada setiap indikator kinerja akan mengakibatkan organisasi mengalami kesulitan untuk menentukan apakah ada kemajuan yang diperoleh dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah direncanakan.

Tabel 3. Alur Logika Pengujian Kesesuaian Informasi Komponen Output pada Dokumen Perencanaan Komponen Strategi Alur Logika-Cetak Biru Kinerja

| No. | Komponen Output | | |
|-----|--|---|--------------|
| | Indikator Kinerja Pada RENJA | Indikator Kinerja Pada Lakip | Keterangan |
| 1. | Nilai SAKIP | Presentase penurunan kejadian bencana tanah longsor | Tidak Sesuai |
| 2. | Presentase jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana | Presentase korban bencana yang mendapat bantuan | Tidak Sesuai |
| 3. | Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Presentase fasilitas umum yang dapat berfungsi kembali | Tidak Sesuai |
| 4. | Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Presentase rumah tangga atau pengungsi pasca bencana yang menerima bantuan per RT | Tidak Sesuai |

Pemetaan Komponen Output Menggunakan 4-Kuadran Friedman

Penggunaan pendekatan empat kuadran Friedman merupakan cara untuk memetakan indikator kinerja kedalam empat kuadran terkait dengan orientasi upaya dan hasil. Komponen keluaran terdiri dari indikator kinerja pada RENJA 2021 dan LAKIP 2021. Hasil dari pemetaan indikator kinerja ini akan menunjukkan prioritas dari indikator kinerja pada dokumen RENJA dan LAKIP. Komponen keluaran dengan kriteria prioritas terbaik ketika indikator kinerja teridentifikasi dalam kuadran kualitas yaitu kuadran 1 dan 3. Berikut adalah ranking prioritas dari pemetaan indikator kinerja:

1. Indikator kinerja kriteria kualitas – hasil, disebut kuadran 1
2. Indikator kinerja kriteria kualitas – upaya, disebut kuadran 2
3. Indikator kinerja kriteria kuantitas – hasil, disebut kuadran 3
4. Indikator kinerja kriteria kuantitas – upaya, disebut kuadran 4

Identifikasi indikator kinerja utama dikaitkan dengan indikator kinerja *outcomenya* apakah output tersebut merupakan pengukuran kinerja dalam bentuk upaya (*effort*) yang

dilakukan atau hasil (*effect*) yang diperoleh. Kemudian upaya atau hasil tersebut dipetakan termasuk dalam kuadran kuantitas atau kualitas. Setelah itu disesuaikan dengan indikator *outcome* apakah merupakan manfaat kegiatan pelayanan (*service delivery outcome*) atau merupakan manfaat pada masyarakat/pelanggan yang dituju (*community outcome*). Secara umum, pertanyaan untuk mengidentifikasi output tersebut ke dalam empat kuadran Friedman adalah sebagai berikut:

- a. Kuantitas upaya (*quantity of effort*): seberapa banyak pelayanan diberikan?
- b. Kualitas upaya (*quality of effort*): seberapa baik pelayanan diberikan?
- c. Kuantitas hasil (*quantity of effect*): seberapa banyak pelanggan/masyarakat yang menjadi lebih baik?
- d. Kualitas hasil (*quality of effort*): berapa persen pelanggan/masyarakat yang menjadi lebih baik?

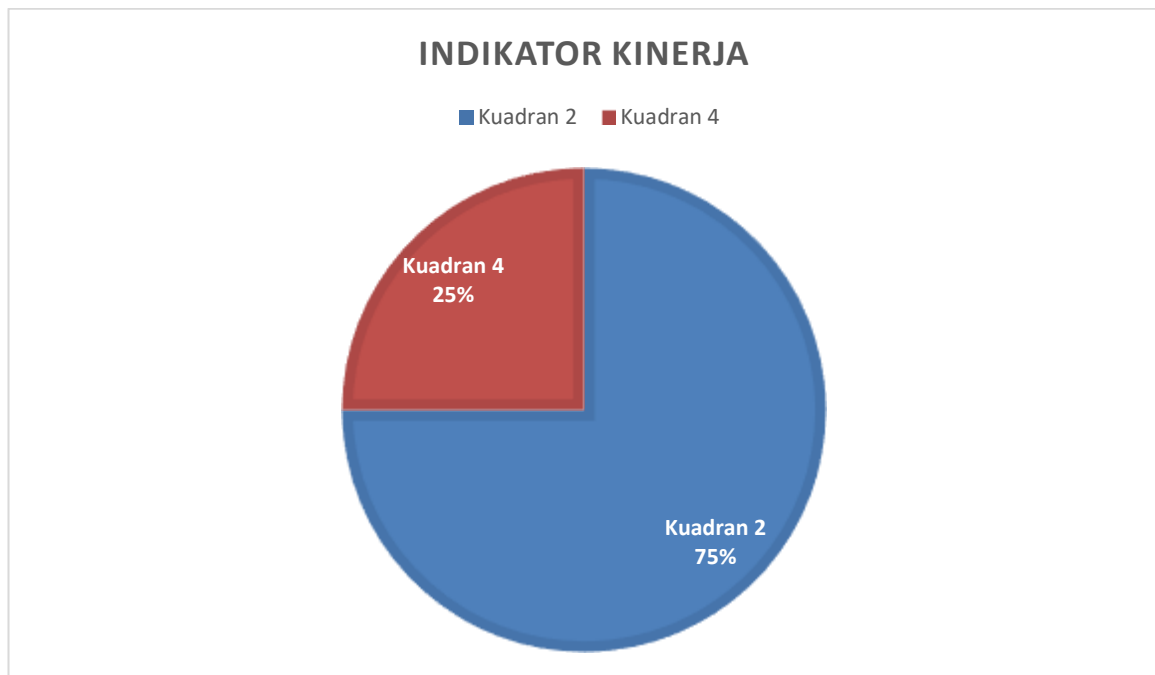
Pengklasifikasian indikator kinerja ditetapkan berdasarkan mempertimbangkan setiap indikator kinerja ke dalam empat pertanyaan yang telah ditentukan oleh Friedman. Berikut adalah hasil pemetaan indikator kinerja pada dokumen RENJA 2021 sebagai komponen output dengan menggunakan Model Logika-Cetak Biru Kinerja.

Dalam praktiknya, pemetaan komponen output menggunakan 4-kuadran Friedman dapat dilakukan dengan cara memetakan setiap komponen output ke dalam salah satu dari empat kuadran berdasarkan pada tingkat pentingnya dan tingkat keterukurannya. Setelah itu, dapat dilakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja atau hasil proyek atau program. Metode ini dapat membantu dalam membuat keputusan strategis yang lebih baik dan meningkatkan efektivitas proyek atau program secara keseluruhan.



Gambar 3. Pemetaan 4-Kuadran Friedman Dokumen RENJA

Proporsi persentase pemetaan kinerja utama yang ada pada RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan dapat dilihat pada Gambar 4 berikut:

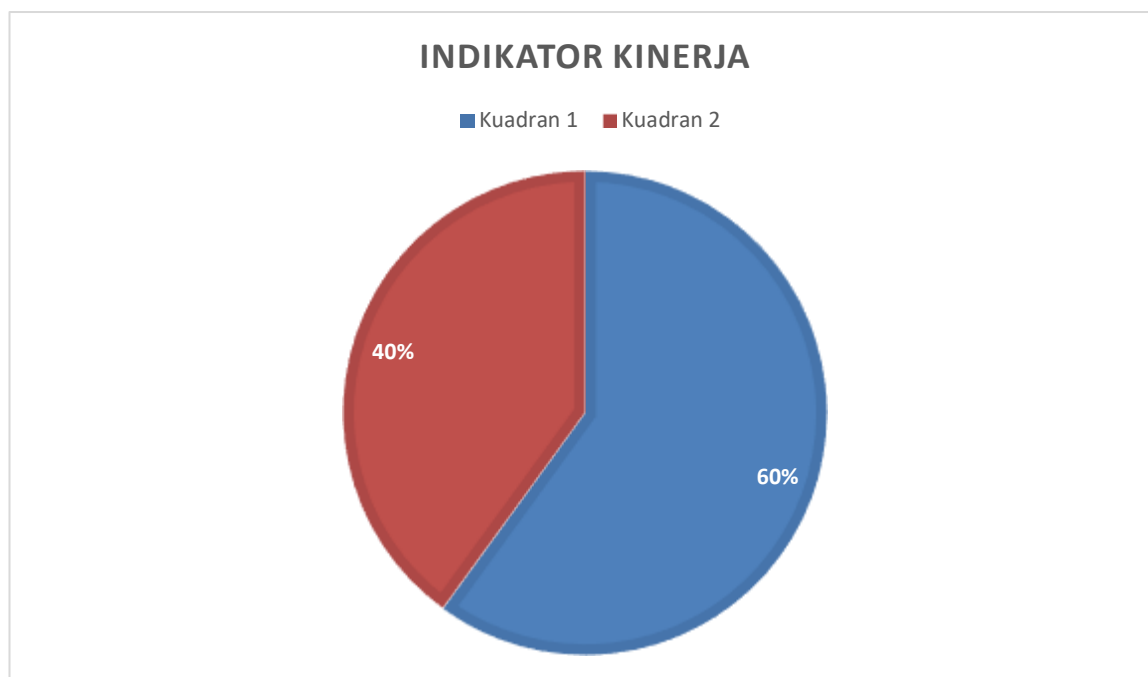


Gambar 4. Proporsi Persentase Komponen Keluaran RENJA

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 (tiga) atau 75% indikator kinerja pada dokumen RENJA berada pada kuadran 2. Indikator kinerja pada kuadran 2 memetakan bahwa sistem pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan memprioritaskan kinerjanya pada kuadran kualitas-upaya. Kuadran 2 mengidentifikasi bahwa indikator kinerja disusun untuk mencapai target kinerja yang berorientasi pada kualitas pemberian kepada masyarakat (*service delivery outcomes*) padahal saat ini yang diharapkan kinerja pemerintah adalah kinerja yang berbasis hasil dan dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik (Friedman, 2005).

| Komponen Keluaran | | | |
|-------------------|---|------------|----------------|
| Kuantitas # | | Kualitas % | |
| Kuadran 4 | 0 | UPAYA | Kuadran 2 2 |
| Kuadran 3 | 0 | HASIL | Kuadran 1 3 |

Gambar 4. Pemetaan 4-Kuadran Friedman Dokumen LAKIP



Gambar 5. Pemetaan 4-Kuadran Friedman Dokumen LAKIP

Hasil pemetaan indikator kinerja berdasarkan pemetaan 4 -kuadran Friedman pada dokumen LAKIP menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) atau 60% dari semua indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan berada pada kuadran 1 yang menunjukkan bahwa kinerja organisasinya telah berorientasi pada kebermanfaatannya bagi masyarakat (*community outcome*). Penyusunan indikator kinerja pada dokumen LAKIP yang telah berorientasi pada kebermanfaatannya bagi masyarakat yang terlayani menunjukkan bahwa sistem pengukuran kinerja telah memberikan dampak yang baik bagi masyarakat (Friedman, 2005).

Jika dilihat dari prioritas indikator kinerja secara keseluruhan dari dokumen RENJA dan LAKIP, maka jumlah indikator kinerja yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

1. Kuantitas upaya (*quantity of effort*) – Kuadran 4 = 1 indikator kinerja
2. Kualitas upaya (*quality of effort*) – Kuadran 2 = 5 indikator kinerja
3. Kuantitas hasil (*quantity of effect*) – Kuadran 3 = 0 indikator kinerja
4. Kualitas hasil (*quality of effort*) – Kuadran 1 = 3 indikator kinerja

SIMPULAN

Akhir dari penelitian ini dapat diberikan kesimpulan dan rekomendasi hasil analisis terhadap implementasi sistem akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Tarakan. Berdasarkan hasil ringkasan dan pembahasan, sebagai berikut:

1. Implementasi sistem akuntabilitas kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan berdasarkan Alur Logika-Cetak Biru Kinerja menunjukkan bahwa alur logis sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen perencanaan dan pelaporan ditemukan ketidaksesuaian informasi. Ketidaksesuaian informasi ini mengidentifikasi bahwa Badan Penanggulan Bencana Daerah Kota Tarakan mengalami kesulitan dalam mencapai akuntabilitas kinerja organisasinya.
2. Hasil evaluasi indikator kinerja pada dokumen RENJA dan LAKIP menggunakan pemetaan 4 kuadran-Friedman menunjukkan bahwa indikator kinerja yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan telah berorientasi pada kualitas hasil sebesar 33% dan kualitas upaya sebesar 55%.
3. Sebagai rekomendasi implikasi dari penelitian ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan dapat menggunakan Alur Logika-Cetak Biru Kinerja sebagai alat bantu untuk reviu terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah direncanakan agar akuntabilitas dan indikator kinerja yang berorientasi pada kebermanfaatan bagi masyarakat (*community outcome*) dapat tercapai.
4. Penelitian ini hanya dilakukan pada dokumen RENSTRA, RENJA dan LAKIP tahun 2021 sehingga pada penelitian berikutnya dapat melakukan analisis terhadap kondisi sasaran strategis dan indikator kinerja yang lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. (2011). *Performance Measurement and Accountability in Indonesian Local Government. Dissertation.*
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar.* Jakarta: Erlangga.
- Friedman, M. (2005). *Trying Hard Is Not Good Enough: How to Produce Measurable Improvements for Customers and Communities.* FPSI.
- Knowlton, L., & Philips, C. (2013). *The Logic Model Guidebook: Better Strategies for Great Result 2nd ed.* USE: SAGE Publications.
- Longo, P. (2002). *The Performance Blueprint, an Integrated Logic Model Developed to Enhance Performance Measurement Literacy: The Case of Performance-Based Contract Management.*
- Rahmadoni, F. (2018). *Evaluasi Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Berbasis Hasil. Jurnal Ekonomi dan Manajemen STIE Pertiba Pangkalpinang, 53-69.*

R, Radinda., S, Suji. (2021). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Jaringan Internet E-SAKIP Terhadap Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Survey Pada Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bandung)*. Bandung: Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar.

Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal akuntansi & Keuangan Vol. 2, No. 2, 138-150*.

Wijayanto, Y. (2016). Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kudus). *Accounting and Business Information System Journal Vol.4 No.1*.

Yin, R. (2013). *Studi Kasus Desain & Metode*. Raja Grafindo Persada.